



UPAYAKAN KOMUNITAS MAMPU TERAKOMODIR

Pedestrian Malioboro Tak Luput dari Penataan

YOGYA (KR) - Jalur pedestrian di sepanjang Malioboro hampir tak pernah luput dari penataan. Penataan tersebut tidak sebatas fisik atau infrastruktur melainkan juga aktivitas sosial, ekonomi dan budaya yang memanfaatkannya.

Salah satu yang tengah menjadi perhatian ialah penataan terhadap komunitas angklung. Hal ini lantaran komunitas tersebut sempat mengadu ke lembaga dewan karena sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini belum juga diperbolehkan beraktivitas. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak hanya menimpa komunitas angklung melainkan setiap aktivitas yang berkecenderungan seperti PKL, yakni menempati titik pedestrian tertentu secara massif dan terdapat aktivitas transaksional.

“Penertiban setelah proses penataan Malioboro memang tidak pernah berhenti. Kami harus menempatkan pada kebijakan dari Pemda DIY. Sudah sangat jelas bahwa tidak boleh ada PKL di jalur pedestrian begitu juga asongan serta hal-hal yang dianggap itu juga kecenderungan berlaku seperti PKL,” urai Kepala Dinas Kebudayaan

Kota Yogya Yetti Martanti, dalam rapat kerja di Komisi D DPRD Kota Yogya, Jumat (24/3).

Rapat kerja tersebut dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi terkait aduan komunitas angklung yang belum diperbolehkan kembali menggelar aktivitas di pedestrian Malioboro. Pada kesempatan itu, Yetti yang didampingi jajaran UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya selaku pengelola Malioboro, menegaskan jika setiap komunitas yang menjadi bagian dari Malioboro diupayakan mampu terakomodir. Menurutnya, kawasan pedestrian di Malioboro harus dijaga betul pemanfaatannya sesuai fungsi. Sehingga penataan di sana seakan tidak pernah berhenti dengan mengacu Pergub DIY 44/2022 terkait sumbu filosofis.

Jauh sebelum komunitas angklung, Pemkot pada waktu itu juga menata para seniman

musik atau pengamen di Malioboro. Mereka lantas diminta membuat group atau kelompok agar kemudian diakomodir penampilannya di tempat yang tidak mengganggu jalur pedestrian.

Begitu juga terhadap komunitas angklung yang sebelumnya memanfaatkan jalur pedestrian di Malioboro, kini juga tengah diakurasi. Proses akurasi melibatkan Dewan Kebudayaan Kota Yogya serta mitra dari pemerintah agar ada penyesuaian sesuai karakter kewilayahan dan memperkuat akulturasi budaya. Hasil akurasi tersebut menjadi acuan untuk diakomodir dalam lokasi yang lebih sesuai. “Seperti yang kami akomodasi terhadap kelompok musik itu untuk aktivitas di Teras Malioboro 1. Sekarang kami pun tengah komunikasi untuk bisa tampil juga di Teras Malioboro 2. Termasuk komunikasi dengan KAI agar bisa juga tampil di sana,” paparnya.

Sehingga pihaknya tidak pernah melarang atau menolak kesenian apa pun untuk beraktivitas. Akan tetapi memang tidak bisa digelar di jalur pedestrian kecuali kegiatan seperti festival

atau kalender wisata. Lain halnya jika aktivitas tersebut dilakukan di persil pribadi, maka itu sudah menjadi kewenangan persil. Seperti halnya pertunjukan angklung yang difasilitasi oleh pemilik toko di Malioboro dengan memanfaatkan persilnya sendiri.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Ekwanto, menambahkan sejak Februari 2022 keputusan Gubernur DIY sudah final bahwa tidak boleh lagi ada PKL di pedestrian Malioboro. Begitu pula terhadap berbagai aktivitas turunan seperti pengasong, otoped dan sebagainya. Bahkan khusus otoped sudah diatur secara lebih tegas untuk seluruh Kota Yogya kecuali di kawasan perumahan, perkantoran dan kompleks wisata.

“Jangan sampai muncul kesan PKL gaya baru. Makanya kalau ada yang muncul itu selalu kucing-kucingan dengan petugas. Termasuk sekarang ada kurasi untuk angklung itu agar nanti kita atur tempat tampilnya dan nuansa Yogya juga semakin kuat. Kalau kegiatan itu di persil, mangga. Tetapi yang di pedestrian ini perlu kita tata bersama,” katanya. **(Dhi-f)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005